

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Gerakan Sosial

Pada awalnya studi gerakan sosial seringkali mempergunakan pendekatan dan memandang perilaku kelompok yang menentang kebijakan negara dan sosial merupakan perilaku tidak wajar di masyarakat. Gerakan sosial secara umum memobilisasi anggota-anggota (partisipan-partisipan) untuk berusaha menyuarakan keluhan atau mencapai tujuan jangka menengah dan jangka pendek tertentu. Selain itu, sejauh gerakan sosial seringkali melibatkan hanya sebagian penduduk dalam mobilisasinya melawan pihak musuh entah itu negara, institusi, atau bagian lain masyarakat dan memanifestasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.

Gerakan sosial, menurut Singh (2001: 36-37), biasanya merupakan mobilisasi untuk menentang negara dan sistem pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata, sebagaimana terjadi dalam kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Menurutnya, umumnya gerakan sosial menyatakan dirinya di dalam kerangka nilai demokratik.

Della Porta dan Diani (1999: 13-16) menawarkan sedikitnya empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni (1) jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif, dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan

jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus-menerus. Hal-hal ini pula yang membedakan gerakan sosial dengan gerakan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan, sekte-sekte agama, protes sesaat, atau koalisi politik sesaat. (*Dimpos Manulu, Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik, 2007*).

Gerakan sosial perspektif Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak pihak lawan lainnya. Konsep gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial yang didefinisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam konteks penelitian kali ini, teori yang digunakan gerakan sosial dari Tarrow yang oleh peneliti dianggap relevan dengan realitas dan data yang ditemukan dalam penelitian lapangan karena dalam penelitian ini ada sebuah perlawanan dari sekelompok masyarakat yang merasa sebuah kebijakan atau rencana yang dikemukakan oleh pemegang kekuasaan tidak sesuai dengan apa yang

dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. (*Laulil Mahfud, Muhammad, Gerakan Sosial Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan di Jalur Pendakian Gunung Penanggungan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, 2015*).

Masih dalam konteks gerakan sosial Tarrow, tindakan yang didasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentius collective action*). Tindakan kolektif bias mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial. Menurut Tarrow gerakan sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh warga Negara
- 2) Dikerjakan bersama
- 3) Mempunyai tujuan
- 4) Menggunakan strategi
- 5) Terkait isu publik

Lebih jauh, gerakan sosial perlu dibedakan dengan sejumlah pengorganisasian sosial berikut. *Pertama*, meskipun berbeda, gerakan sosial dan organisasi formal kadang-kadang memiliki batasan yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah

menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual bisa berubah menjadi organisasi formal, sementara itu sangat jarang sekali suatu organisasi formal berubah menjadi suatu gerakan sosial. *Kedua*, meski tidak terlalu mudah, gerakan sosial juga perlu dibedakan dengan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam cara yang menguntungkan para anggota-anggotanya. Dalam pandangan teori sistem semisal fungsionalisme structural, gerakan sosial tidak akan muncul kecuali karena kekacauan, patologi dan disorganisasi sosial yang dihadapi atau diimbangi oleh mekanisme penyeimbangan sistem. Sebaliknya menurut teori pilihan rasional modern, gerakan sosial menggambarkan cara normal untuk mencapai tujuan politik, sebagai bentuk khusus tindakan politik yang dilakukan sekumpulan orang yang memperjuangkan tujuan mereka karena mereka tak mempunyai lembaga yang mewakili kepentingan mereka.

Gerakan sosial tidak muncul begitu saja, ada beberapa tahapan yang melatarbelakangi timbulnya sebuah gerakan sosial. *Pertama*, hubungan antara proses framing dan suatu pemikiran tentang perubahan politik objektif yang memfasilitasi kemunculan gerakan sosial. Perubahan politik tertentu mendorong mobilisasi tidak hanya melalui pengaruh objektif yang diakibatkan oleh perubahan relasi kekuasaan tetapi juga oleh setting dalam pergerakan proses framing yang selanjutnya menggerogoti legitimasi sistem. *Kedua*, suatu gerakan sosial juga bisa muncul karena kaitan resiprokal antara proses framing dan mobilisasi. Proses framing secara jelas mendorong mobilisasi ketika orang-orang berupaya mengorganisasi dan bertindak

pada basis kesadaran yang berkembang tentang ketidakabsahan dan kerentanan sistem. Pada saat yang sama, potensi bagi proses framing yang kritis dikondisikan oleh akses orang-orang kepada berbagai struktur mobilisasi. Dan hal ini akan lebih mungkin terjadi dalam kondisi organisasi yang kuat daripada kondisi organisasi yang lemah. Dengan kata lain, proses framing tidak akan terjadi dalam kondisi ketiadaan organisasi, karena ketiadaan struktur mobilisasi hampir pasti akan mencegah penyebaran framing ke jumlah minimal orang diperlukan untuk basis tindakan kolektif. (*Laulil Mahfud, Muhammad, Gerakan Sosial Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan di Jalur Pendakian Gunung Penanggungan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, 2015*).

2.1.2 Teori Proses Framing

Teori proses framing dalam memahami sukses dan gagalnya sebuah gerakan sosial, meskipun teori ini baru berkembang pada dekade 70-an. Snow dan Banford mencatat, suksesnya gerakan sosial terletak sampai sejauhmana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Snow dan Benford, menekankan dua komponen penting dalam memframing gerakan, yaitu, diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya dan prognotis elemen, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut. Zald

berpendapat bahwa pengkontesan framing terjadi dalam interaksi berhadap-hadapan dan melalui beragam media cetak dan elektronik, buku, pamflet. Aktivis gerakan sosial mempergunakan warung kopi, cafe dan ruang-ruang pertemuan sebagai media berdebat dengan mensosialisasikan isu sehingga kelompok masyarakat berkeinginan untuk terlibat dalam gerakan sosial tersebut.

Mc Carthy dan Zald memiliki gagasan serupa mengenai framing dalam media. Mereka menekankan bahwa media adalah target utama bagi upaya proses framing dalam gerakan sosial. *(Situmorang Abdul, 2013:41-44)*.

Konsep tentang framing yang digunakan dalam studi gerakan sosial berasal dari pemikiran Goffman, yang mengartikan framing sebagai proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi makna. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realita. Analisis framing juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media¹⁶. Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu yang ditampilkan pada khalayak.

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagianbagian tertentu yang lain disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena digiring pada satu

realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Di tambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dalam berita tersebut. *(Situmorang Abdul,2013:51)*

Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaiian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaiian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan di rekonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Goffman mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Menurut Gamson dalam Situmorang Abdul, (2013:66) gerakan sosial membutuhkan tiga frame atau bingkai, antara lain :

- 1) Agregate Frame, yakni proses pendefinisian isu terhadap permasalahan yang ada. Hal ini terkait dengan individu yang mendengar frame atas kejadian tersebut menjadi sadar bahwa isu merupakan permasalahan bersama yang bagi setiap individu.
- 2) Consensus Frame, yakni proses mendefinisikan masalah sosial hanya dapat dilakukan dan mampu diselesaikan oleh tindakan kolektif. Consensus frame ini merupakan usaha mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

3) Collective Action Frame, yakni proses pendefinisian yang berkaitan dengan alasan mengapa tindakan kolektif dibutuhkan, dan tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. Frame ini dikonstruksi oleh tiga elemen, injustice frame, frame ini menyediakan alasan mengapa kelompok tersebut harus bertindak sesegera mungkin. Agency frame, frame ini berhubungan dengan pembentukan konstruksi siapa kawan siapa lawan. Identity frame, frame yang mengidentifikasi bahwa frame kelompok mereka berbeda dengan yang lainnya.

Framing tindakan kolektif juga melakukan fungsi penafsiran dan pemahaman yang dimaksudkan untuk memobilisasi pengikut potensial dan konstituen, untuk menggalang dukungan penonton dan memobilisasi antagonis. Dengan demikian, framing tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan dan kampanye dari organisasi gerakan social.

Teori ini memanfaatkan kebijaksanaan publik lalu digunakan para aktivis gerakan untuk mempelajari bagaimana para aktivis gerakan membingkai isu-isu ketidakadilan ekologi yang terjadi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan diinterpretasi oleh partisipasinya sehingga menjadi faktor penggerak utama aksi kolektif dan gerakan lingkungan hidup dibingkai dengan beragam ideologi atau isu seperti konservasi, reservasi, eko sosial, dan eko feminis.

Dalam penelitian tentang gerakan mahasiswa pemuda tastera dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, proses framing akan digunakan untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh gerakan pemuda tastera dalam

membangkitkan ide-ide yang ada berdasarkan fakta empiris. Sehingga informasi dan fakta yang ada dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh para partisipannya.

2.1.3 Teori Mobilisasi Sumber Daya

Di dalam tulisannya mengenai struktur mobilisasi sumberdaya, Mc Carthy menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur mobilisasi. Mc Carthy mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termasuk didalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi juga memasukan serangkaian posisi-posisi sosial dalam struktur mobilisasi mikro. Tujuannya untuk mencari lokasi – lokasi dalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi (*Situmorang Abdul, 2013:38-41*).

Slemser seperti dikutip dalam Sanderson, menjelaskan beragam dalam tindakan dalam gerakan sosial terjadi karena adanya mobilisasi atas dasar sistem keyakinan yang mengalami proses generalisasi yang terdiri dari hal-hal yang bersifat hysteria, keinginan, norma dan nilai. (Sanderson, 1995:60). Perspektif sumber daya mobilisasi menunjukkan beragam tindakan partisipan dalam gerakan sosial. Sumber daya mobilisasi sebagai sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. (*McAdam, McCarthy, dan Zald, 1996:141*)

Tilly dikutip oleh Muhtadi mengatakan bahwa salah satu sumber daya yang paling penting adalah jaringan informal dan formal yang menghubungkan individu-individu dengan organisasi gerakan sosial (Muhtadi, 2000:9). Jaringan yang

dijelaskan oleh Klandermans, seperti dikutip kembali oleh Muhtadi sebagai struktur sosial, yaitu serangkaian hubungan sosial yang mendorong dan menghambat perilaku, sikap dan kemungkinan partisipan untuk terlibat dalam suatu gerakan sosial. Klandermans, kemudian menjelaskan pentingnya kepemimpinan dalam menetapkan sumber daya bagi para partisipan suatu gerakan sosial. Sedangkan Maguire, membagi sumber daya dalam dua kategori, yaitu *tangible* yang mencakup uang, ruang, perlengkapan dan seterusnya. Sedangkan *intangible* yang mencakup kapasitas kepemimpinan, manajerial, dan pengalaman organisasi, justifikasi ideologis, taktik dan semacamnya (Muhtadi, 2011:9).

Mc Carty melihat gerakan sosial yang mempergunakan struktur informal sebagai analisi, belum mampu memetakan struktur informal secara mendalam. Struktur sumber daya mobilisasi merupakan posisi sosial dan lokasi dalam masyarakat untuk dalam dimobilisasi dalam suatu gerakan sosial. Kelompok atau organisasi formal memainkan peranan penting dalam membentuk struktur mobilisasi yang kemudian disebut sebagai gerakan sosial.

Selanjutnya, setiap gerakan sosial tentunya membutuhkan sumber daya untuk bias menjalankan aktivitas kolektifnya. Dalam hal ini, gerakan sosial memiliki beberapa tugas penting seperti memobilisasi pendukung, mengorganisasi sumber daya, yang dalam level yang lebih jauh berdampak pada munculnya simpati elite-elite dan masyarakat secara umum terhadap cita-cita gerakan. Inilah konsep yang disebut *resources mobilization*. Konsep ini secara mendasar berusaha mengetahui bagaimana sebuah kelompok mengupayakan *resources* yang mereka miliki untuk bisa

melakukan perubahan sosial dan tercapainya tujuan kelompok (*Edward dan McCarthy, 2004:118*).

Konsep ini berusaha melihat dorongan upaya, baik secara kolektif maupun individual, yang muncul sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang dimiliki oleh gerakan sosial. *Resources* sendiri sebenarnya memiliki makna yang begitu luas. *Resources* dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup. Hanya saja hal itu dimaknai dalam arti yang lebih luas, yakni sesuatu yang memiliki manfaat (*utility*). Tidak semua hal yang memiliki nilai manfaat bisa disebut sebagai *resources*. Hal itu baru bisa disebut sebagai *resources* ketika individu atau aktor kolektif bisa mengontrolnya dan memanfaatkannya guna tercapainya tujuan gerakan.

Kerangka *resources mobilization* ini menjelaskan dua aspek sekaligus. Pertama, mengenai sumberdaya fisik, non-fisik, maupun finansial yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti bangunan, uang, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Sumber daya tersebut bisa dikontrol baik secara individual maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi merupakan suatu proses tak terpisahkan yang para aktornya berusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari gerakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai pembanding dalam penelitian ini. Penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian dengan tema yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Saudari Wika Dwi Lestari (2019) dari Universitas Siliwangi yang berjudul *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam Upaya Menunjang Good Governance di Tasikmalaya*. Penelitian ini menggunakan teori tentang Masyarakat Sipil (*civil society*) dan kerangka konseptualisasi *Good Governance*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa dokumen, arsip atau foto-foto. Analisis data menggunakan teknik analisis data di lapangan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesembilan prinsip-prinsip yang ada dalam kerangka konseptualisasi *good governance* telah diperankan oleh KMRT dalam upaya menunjang dan mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tasikmalaya. Keseriusan KMRT dalam mendorong terwujudnya *good governance* terlihat dari program-program yang telah dilaksanakan terutama pada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya KMRT mempunyai 3 Divisi kerja utama, yaitu

Divisi Monitoring Hukum dan Korupsi Politik (DMHKP), Divisi Pelayanan Publik (DMPP), dan Divisi Pendidikan dan Pengkaderan (DPP). Dengan fungsinya sebagai kontrol sosial, pendampingan kasus dan pemberdayaan masyarakat, KMRT bersama dengan masyarakat dan organisasi lainnya mampu memberikan dampak yang berarti bagi berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tasikmalaya.

Persamaan dengan penelitian dari Saudari Wika Dwi Lestari (2019) adalah Persamaannya sama-sama meneliti Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT). Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah Saudari Wika Dwi Lestari meneliti tentang peran LSM dalam upaya pemberantasan korupsi secara khusus tetapi juga melihat bagaimana peran LSM untuk mendorong pemerintah mewujudkan good governance sesuai dengan prinsip-prinsipnya di Tasikmalaya, sedangkan penulis meneliti dari sisi gerakan sosialnya.

Kedua, Skripsi oleh Saudari Nuke Faridha Wardhani (2015) dari Universitas Airlangga yang berjudul *Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama warga memperjuangkan Waduk Sepat yang saat ini menjadi sengketa antara warga dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT Ciputra Surya Tbk. Hal ini bermula dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 mengenai tukar guling antara Waduk Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya dengan tanah PT Ciputra Surya Tbk yang saat ini menjadi Surabaya Sport Center (SSC) di

Kelurahan Pakal Surabaya. Dalam proses tukar guling tersebut, belum ada kesepakatan pasti antara warga dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya maupun pihak pengembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan motivasi yang dilakukan oleh LSM dalam memperjuangkan Waduk Sepat, strategi yang digunakan LSM, cara antar LSM maupun LSM dengan warga berkoordinasi dalam mengembangkan isu dan menyatukan ide. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai gerakan sosial yang dilakukan LSM bersama warga berdasar atas rasionalitas yakni menginginkan waduk tersebut kembali seperti fungsinya sedia kala dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. LSM dan warga mempunyai beberapa strategi dalam upaya memperjuangkan Waduk Sepat, seperti melakukan gugatan, melakukan aksi di depan DPRD Kota Surabaya untuk menarik keprihatinan publik secara luas, dan mengadakan sekolah hukum sebagai basis penguatan internal warga. Cara berkoordinasi pun dilakukan dengan memanfaatkan jejaring antar LSM, sekaligus menggunakan media sosial seperti WhatsApp dalam memudahkan komunikasi. Sehingga dasar yang digunakan LSM bersama warga dalam memperjuangkan Waduk Sepat adalah dasar rasionalitas dengan menggerakkan sumber daya yang ada dalam melakukan gerakan sosial.

Persamaan dengan penelitian dari Saudari Nuke Faridha Wardhani (2015) adalah sama-sama meneliti LSM dari sisi gerakan social. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian dan objek penelitian, serta gerakan sosial yang

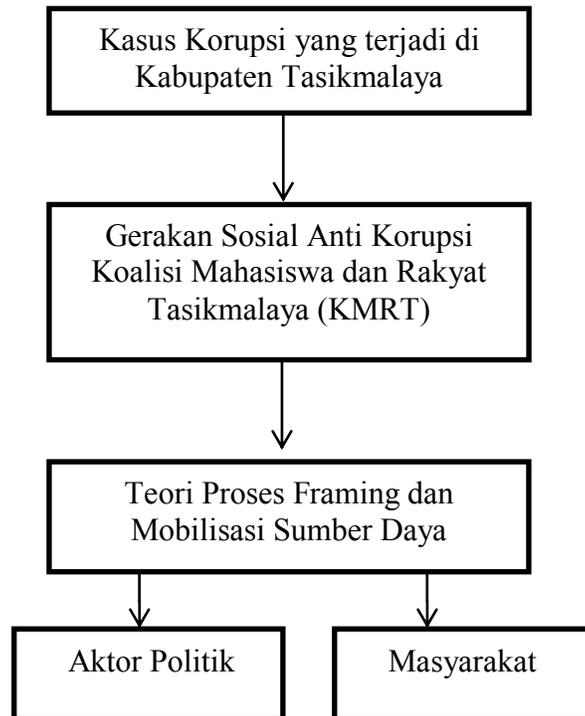
diteliti Saudari Nuke Faridha Wardhani hanya menggerakkan sumber daya sedangkan penulis framing dan menggerakkan sumber daya.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Wika Dwi Lestari (2019)	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dalam Upaya Menunjang Good Governance di Kabupaten Tasikmalaya	Penelitian ini membahas tentang Peran LSM Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) sebagai elemen <i>civil society</i>	Penelitian ini lebih membahas peran sedangkan penulis dari sisi gerakan sosial	Persamaannya sama-sama meneliti Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)
2.	Nuke Faridha Wardhani (2015)	Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memperjuangkan Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.	Penelitian ini membahas tentang Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memperjuangkan sengketa lahan	Penelitian hanya dari teori menggerakkan sumber daya sedangkan penulis proses framing dan menggerakkan sumber daya.	Persamaannya sama-sama meneliti LSM dan gerakan sosial anti korupsi

2.3 Kerangka Pemikiran

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir



Deskripsi Kerangka Pemikiran:

Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat.

Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan, atau struktur pemerintah.

Gerakan sosial melalui LSM juga muncul di berbagai daerah yang bergerak mengikuti kebutuhan dan juga kondisi akuntabilitas yang ada di daerah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya terbentuk sebuah organisasi non pemerintah yang bernama Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) yang didirikan pada tanggal 09 Desember 2004 di Tasikmalaya. Di tengah tidak berjalannya reformasi 1998 di Tasikmalaya dengan implikasi semakin maraknya korupsi di sektor legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. KMRT merupakan sebuah LSM yang didalamnya terdapat mahasiswa dan masyarakat. KMRT bukan gabungan dari beberapa komunitas atau organisasi. KMRT diakui oleh pemerintah tetapi tidak pernah difasilitasi karena tugas mereka untuk mengkritisi pemerintah itu sendiri. Keberadaan KMRT bertujuan mewujudkan *good governance* dan mengembangkan partisipasi publik di Tasikmalaya. Korupsi telah mendistorsi kebijakan publik sehingga melahirkan buruknya kualitas layanan publik, kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Tasikmalaya, salah satu kasusnya melibatkan Sekretaris Daerah Pemkab Tasikmalaya. Dengan adanya peran gerakan

sosial anti korupsi ini bisa membantu meminimalisir kasus-kasus yang terjadi, jadi Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) di sini sangat memiliki peranan yang penting dalam memberantas korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk teori yang berkaitan dengan kasus ini adalah Teori Mobilisasi Daya karena mobilisasi merupakan suatu proses tak terpisahkan yang para aktornya berusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari gerakan.